

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN BA.018  
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019**

Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate  
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019

JL. Pemuda, Kel. Sangadji, Ternate - Maluku Utara

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Ternate, 31 Desember 2019  
Kepala Balai,,

Ir. Yusup Patiroy, MM  
NIP. 196606051993031004

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Tanah

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Piutang Bukan Pajak

C.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

C.1.3. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.3.1. Aset Lain-lain

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.5. Ekuitas

C.5.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

- D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - E.1. Ekuitas Awal
  - E.2. Surplus/Defisit-LO
  - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
    - E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
  - E.4. Transaksi Antar Entitas
    - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
    - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
  - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
  - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
  - F.2. Pengungkapan Lain-lain

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ternate, 31 Desember 2019  
Kepala Balai,,

Ir. Yusup Patiroy, MM  
NIP. 196606051993031004

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp451.373.690,00 atau mencapai 165,16% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp273.303.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp9.714.367.945,00 atau mencapai 99,77% dari alokasi anggaran sebesar Rp9.736.310.000,00

### II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp30.309.244.550,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp339.901.186,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp29.969.343.364,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp54.909.500,00 dan Rp30.254.335.050,00.

### III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp381.264.353,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp10.252.472.105,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-9.871.207.752,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp101.887.178,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-9.769.320.574,00.

### IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp30.743.842.119,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-9.769.320.574,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp9.279.813.505,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp30.254.335.050,00.

## **V. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TERNATE  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019			31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	273.303.000,00	451.373.690,00	165,16	376.494.994,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>273.303.000,00</b>	<b>451.373.690,00</b>	<b>165,16</b>	<b>376.494.994,00</b>
<b>BELANJA</b>					
Belanja Pegawai	B.3.	3.442.340.000,00	3.439.743.386,00	99,92	3.022.203.314,00
Belanja Barang	B.4.	5.223.470.000,00	5.204.840.559,00	99,64	4.551.295.150,00
Belanja Modal	B.5.	1.070.500.000,00	1.069.784.000,00	99,93	704.665.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>9.736.310.000,00</b>	<b>9.714.367.945,00</b>	<b>99,77</b>	<b>8.278.163.464,00</b>



## II. NERACA

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TERNATE  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.	626.224,00	4.335.561,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	-3.131,00	-21.678,00
Persediaan	C.1.3.	339.278.093,00	492.074.556,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>339.901.186,00</b>	<b>496.388.439,00</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Tanah	C.2.1.	10.675.417.000,00	10.625.457.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	8.161.119.773,00	6.550.564.846,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	17.684.289.060,00	17.634.344.060,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	200.652.000,00	200.652.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	18.900.000,00	18.900.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-6.771.034.469,00	-4.737.064.190,00
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>29.969.343.364,00</b>	<b>30.292.853.716,00</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
Aset Lain-lain	C.3.1.	0,00	892.596.927,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	0,00	-890.956.713,00
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>0,00</b>	<b>1.640.214,00</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>30.309.244.550,00</b>	<b>30.790.882.369,00</b>
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	54.909.500,00	47.040.250,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>54.909.500,00</b>	<b>47.040.250,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>54.909.500,00</b>	<b>47.040.250,00</b>
<b>Ekuitas</b>			
Ekuitas	C.5.	30.254.335.050,00	30.743.842.119,00
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>30.254.335.050,00</b>	<b>30.743.842.119,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>30.309.244.550,00</b>	<b>30.790.882.369,00</b>

**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TERNATE  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	381.264.353,00	377.364.386,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>381.264.353,00</b>	<b>377.364.386,00</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2.	3.465.369.386,00	3.022.203.314,00
Beban Persediaan	D.3.	556.770.891,00	137.749.815,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.814.375.500,00	2.440.358.500,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	719.297.050,00	692.063.350,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.301.743.259,00	1.118.471.050,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	1.394.934.566,00	559.184.541,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	-18.547,00	21.678,00
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>10.252.472.105,00</b>	<b>7.970.052.248,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>-9.871.207.752,00</b>	<b>-7.592.687.862,00</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	66.400.000,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	76.210.525,00	26.525.202,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	40.723.347,00	9.001.803,00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>101.887.178,00</b>	<b>17.523.399,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>-9.769.320.574,00</b>	<b>-7.575.164.463,00</b>

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TERNATE  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1.	30.743.842.119,00	30.149.797.522,00
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2.	-9.769.320.574,00	-7.575.164.463,00
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR</b>	E.3.	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.1.	0,00	0,00
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.4.	9.279.813.505,00	8.169.209.060,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.5.</b>	<b>30.254.335.050,00</b>	<b>30.743.842.119,00</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate

Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate merupakan penggabungan dari dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Badan Karantina Pertanian, yaitu Stasiun Karantina Hewan Kelas II Ternate dan Stasiun Karantina Tumbuhan Kelas II Ternate. Sejak tanggal 3 April 2008, kedua UPT tersebut bergabung dengan nama Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate berdasarkan Permentan Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian. Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate berkedudukan di Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan salah satu upayanya adalah untuk Melindungi Negeri ini dari ancaman Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) maupun Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) baik antar area dalam negara Kesatuan Republik Indonesia maupun Export dan Impor khususnya di wilayah Maluku Utara. Melindungi negeri dari ancaman Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) & Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) adalah kewajiban setiap insan di negeri ini tanpa terkecuali. Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate, berkomitmen melindungi keanekaragaman hayati nabati dan hewani, melalui seluruh wilayah kerjanya. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 dan Permentan Nomor 22 Tahun 2008 menjadi pondasi dilaksanakannya kegiatan karantina pertanian di Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate berkomitmen dengan visi ***“Menjadi Instansi Karantina Terbaik di Propinsi Maluku Utara”***

Terbaik dalam hal :

- Kecepatan pelayanan penerbitan sertifikat karantina
- Pengawasan dan pelayanan karantina 24 jam
- Pelaporan kegiatan yang real time
- Pengelolaan keuangan yang akuntabel
- Pengelolaan asset dan dokumen yang tertib.

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

## **A.3. Basis Akuntansi**

Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik

yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate adalah sebagai berikut:

### **(1) Pendapatan - LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(2) Pendapatan - LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	
--	---	--

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  1. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  2. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  3. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.



**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek
 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang
 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**(7) Ekuitas**

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian Dan Peternakan	228.663.000,00	228.663.000,00
Pendapatan Jasa Lainnya	44.640.000,00	44.640.000,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>273.303.000,00</b>	<b>273.303.000,00</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.940.680.000,00	2.347.066.000,00
Belanja Lembur	1.001.660.000,00	1.095.274.000,00
Belanja Barang Operasional	1.694.326.000,00	1.716.910.000,00
Belanja Barang Non Operasional	480.950.000,00	490.950.000,00
Belanja Barang Persediaan	431.700.000,00	351.700.000,00
Belanja Jasa	586.454.000,00	633.870.000,00
Belanja Pemeliharaan	719.880.000,00	719.880.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.310.160.000,00	1.310.160.000,00
Belanja Modal Tanah	50.000.000,00	50.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	970.500.000,00	970.500.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9.236.310.000,00</b>	<b>9.736.310.000,00</b>

### B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp451.373.690,00 atau mencapai 165,16% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp273.303.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	66.400.000,00	0,00

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
<b>Akun Pendapatan</b>			
Pendapatan Denda	0,00	6.641.580,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	44.640.000,00	36.270.000,00	81,25
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	228.663.000,00	342.062.110,00	149,59
<b>Jumlah</b>	<b>273.303.000,00</b>	<b>451.373.690,00</b>	<b>165,16</b>

Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 19,89% dibandingkan TA 2018. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan  
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	66.400.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda	6.641.580,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	36.270.000,00	28.056.000,00	29,28
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	342.062.110,00	344.972.825,00	-0,84
Pendapatan Lain-lain	0,00	3.466.169,00	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>451.373.690,00</b>	<b>376.494.994,00</b>	<b>19,89</b>

## B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp9.714.367.945,00 atau 99,77% dari anggaran belanja sebesar Rp9.736.310.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per  
31 Desember 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
<b>Akun Belanja</b>			
Belanja Pegawai	3.442.340.000,00	3.441.366.804,00	99,97
Belanja Barang	5.223.470.000,00	5.204.840.559,00	99,64
Belanja Modal	1.070.500.000,00	1.069.784.000,00	99,93
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>9.736.310.000,00</b>	<b>9.715.991.363,00</b>	<b>99,79</b>

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
<b>Akun Belanja</b>			
Pengembalian Belanja		-1.623.418,00	0,00
<b>Total Belanja</b>	<b>9.736.310.000,00</b>	<b>9.714.367.945,00</b>	<b>99,77</b>

Dibandingkan dengan Tahun 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 17,35% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya penambahan pegawai baru (CPNS) sebanyak 7 orang dengan jumlah tanggungan sebanyak 14 jiwa.
2. Adanya kenaikan pangkat pegawai dalam jabatan fungsional dan reguler sebanyak 8 orang pegawai.
3. Adanya peningkatan dalam kebutuhan belanja barang operasional, serta meningkatnya harga satuan tiket pesawat yang mempengaruhi meningkatnya realisasi belanja perjalanan
4. Adanya belanja modal yang lebih besar dalam kegiatan dan pagu anggarannya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja  
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Belanja Pegawai	3.439.743.386,00	3.022.203.314,00	13,82
Belanja Barang	5.204.840.559,00	4.551.295.150,00	14,36
Belanja Modal	1.069.784.000,00	704.665.000,00	51,81
<b>Total Belanja</b>	<b>9.714.367.945,00</b>	<b>8.278.163.464,00</b>	<b>17,35</b>

### B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.439.743.386,00 dan Rp3.022.203.314,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 13,82% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai baru (CPNS) sebanyak 7 orang dengan jumlah tanggungan sebanyak 14 jiwa
2. Adanya kenaikan pangkat pegawai dalam jabatan fungsional dan reguler sebanyak 8 orang pegawai

Perbandingan Belanja Pegawai  
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.346.093.804,00	1.969.581.314,00	19,12
Belanja Lembur	1.095.273.000,00	1.052.622.000,00	4,05
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>3.441.366.804,00</b>	<b>3.022.203.314,00</b>	<b>13,87</b>
<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>	<b>-1.623.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.439.743.386,00</b>	<b>3.022.203.314,00</b>	<b>13,82</b>

#### B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.204.840.559,00 dan Rp4.551.295.150,00. Realisasi belanja barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 14,36% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya peningkatan dalam kebutuhan belanja barang operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor.
2. Adanya peningkatan harga satuan tiket pesawat yang mempengaruhi realisasi biaya perjalanan dinas.

Perbandingan Belanja Barang  
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.716.906.000,00	1.402.722.600,00	22,40
Belanja Barang Non Operasional	489.964.000,00	438.810.000,00	11,66
Belanja Barang Persediaan	351.668.000,00	354.136.500,00	-0,70
Belanja Jasa	625.262.250,00	545.091.650,00	14,71
Belanja Pemeliharaan	719.297.050,00	692.063.350,00	3,94
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.301.743.259,00	1.118.471.050,00	16,39
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>5.204.840.559,00</b>	<b>4.551.295.150,00</b>	<b>14,36</b>
<b>Pengembalian Belanja Barang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.204.840.559,00</b>	<b>4.551.295.150,00</b>	<b>14,36</b>

#### B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.069.784.000,00 dan Rp704.665.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja

modal pada TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 51,81% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pengembangan berupa timbunan tanah Instalasi Karantina Hewan (IKH) di TA 2019
2. Adanya penambahan kebutuhan penunjang operasional kantor yang dipenuhi dengan pengadaan Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Dinas Roda 2, Meubelair, Alat Pengolah Data, Alat Laboratorium, Alat Komunikasi dan Fasilitas Kantor Lainnya

Perbandingan Belanja Modal  
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Tanah	49.960.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	969.879.000,00	180.405.000,00	437,61
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.945.000,00	524.260.000,00	-90,47
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.069.784.000,00</b>	<b>704.665.000,00</b>	<b>51,81</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.069.784.000,00</b>	<b>704.665.000,00</b>	<b>51,81</b>

#### B.5.1. BELANJA MODAL TANAH

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp49.960.000,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pengembangan berupa timbunan tanah pada Instalasi Karantina Hewan di TA 2019

Perbandingan Belanja Modal Tanah  
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	49.960.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>49.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>49.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### B.5.2. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp969.879.000,00 dan Rp180.405.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019



mengalami kenaikan sebesar 437,61% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Adanya pengadaan Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Dinas Roda 2, Muebelair, Alat Laboratorium, Alat Pengolah Data, Alat Komunikasi dan Fasilitas Kantor Lainnya

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	969.879.000,00	180.405.000,00	437,61
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>969.879.000,00</b>	<b>180.405.000,00</b>	<b>437,61</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>969.879.000,00</b>	<b>180.405.000,00</b>	<b>437,61</b>

### B.5.3. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp49.945.000,00 dan Rp524.260.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 mengalami penurunan sebesar -90,47% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Ada pemasangan paving block pada halaman kantor wilayah kerja sanana seluas 121m<sup>2</sup>

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.945.000,00	524.260.000,00	-90,47
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>49.945.000,00</b>	<b>524.260.000,00</b>	<b>-90,47</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>49.945.000,00</b>	<b>524.260.000,00</b>	<b>-90,47</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1. ASET LANCAR

#### C.1.1. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp626.224,00 dan Rp4.335.561,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

#### Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	626.224,00	4.335.561,00
<b>Jumlah</b>	<b>626.224,00</b>	<b>4.335.561,00</b>

#### C.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-3.131,00 dan Rp-21.678,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

#### Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0,00	0,5%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

#### C.1.3. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp339.278.093,00 dan Rp492.074.556,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan  
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Barang Konsumsi	339.278.093,00	492.074.556,00
<b>Jumlah</b>	<b>339.278.093,00</b>	<b>492.074.556,00</b>

## C.2. ASET TETAP

### C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp10.675.417.000,00 dan Rp10.625.457.000,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018</b>	<b>10.625.457.000,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pengembangan Nilai Aset	49.960.000,00
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>10.675.417.000,00</b>

Mutasi transaksi penambahan tanah adalah berupa pengembangan timbunan tanah pada Instalasi Karantina Hewan seluas 165m

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp8.161.119.773,00 dan Rp6.550.564.846,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018</b>	<b>6.550.564.846,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	852.199.000,00
Transfer Masuk	225.000.000,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	117.680.000,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	415.675.927,00
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>8.161.119.773,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-5.811.843.156,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	<b>2.349.276.617,00</b>

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Pembelian dengan rincian sebagai berikut :

- 4 Unit Sepeda Motor
- 6 Unit Lemari Kayu
- 3 Set Camera CCTV
- 1 Set Teralis Jendela
- 1 Set Meja Kerja/Besi Metal
- 4 Unit Meja Kerja Kayu
- 1 Unit kasur Spring Bad
- 11 Unit AC Split
- 1 Buah Televisi LG
- 1 Buah Dispenser
- 4 Buah Alat Komunikasi(HP Android)
- 1 Buah Hotplate
- 1 Unit Mikroskop dengan camera
- 1 Unit Sentrifuge
- 1 Unit Autoclave
- 1 Unit Leminar Air flow
- 1 Unit Rotator Shaker
- 1 Unit Analitical Balance
- 1 Unit Waterbath Shake Still
- 3 Unit Lap Top
- 3 Unit Printer

2. Transfer Masuk dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Unit station Wagon
- 1 Unit Mini Bus

3. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Unit Centrifuge
- 1 Unit analitical Balance
- 4 Buah micro Pippettes
- 1 Unit Rack Diluter/Pipet

4. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut :

- 3 Buah Penyemprot Tangan/Hand Sprayer
- 2 Buah Mesin Ketik Manual Portable 11-13 Inc
- 1 Buah Mesin Ketik Manual Langewagon 18-27 Inc
- 1 Buah Sice/kursi Sofa
- 1 Buah Driying Oven
- 1 Buah Incubator
- 1 Buah Auto Clave
- 1 Buah Freezer
- 2 Buah Generator

- 2 Buah Meja Rapat
- 3 Buah Meja Komputer
- 1 Buah Jam Elektronik
- 1 Buah Lemari Es
- 3 Buah A.C Window
- 4 Buah A.C Split
- 2 Buah Kipas Angin
- 1 Buah Reach In Frezzer
- 5 Buah Stabilizer UPS
- 1 Buah Coloni Counter
- 6 Buah Laptop
- 1 Buah Note Book
- 1 Buah Net Book
- 2 Buah Printer
- 1 Buah Dust/Mist Scruber Spray Type
- 1 Buah Jet Pump
- 15 Buah Unintteruptible Power Suply (UPS)

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp17.684.289.060,00 dan Rp17.634.344.060,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018</b>	<b>17.634.344.060,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Penyelesaian Pembangunan Langsung	49.945.000,00
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>17.684.289.060,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-915.910.711,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	<b>16.768.378.349,00</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa Penyelesaian Pembangunan Langsung berupa pemasangan Paving Block Halaman Kantor Wilayah Kerja Sanan seluas 121m<sup>2</sup>

### C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp200.652.000,00 dan Rp200.652.000,00.

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp18.900.000,00 dan Rp18.900.000,00.

### C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-6.771.034.469,00 dan Rp-4.737.064.190,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	8.161.119.773,00	-5.811.843.156,00	2.349.276.617,00
2.	Gedung dan Bangunan	17.684.289.060,00	-915.910.711,00	16.768.378.349,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	200.652.000,00	-24.113.102,00	176.538.898,00
4.	Aset Tetap Lainnya	18.900.000,00	0,00	18.900.000,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>26.064.960.833,00</b>	<b>-6.771.034.469,00</b>	<b>19.293.926.364,00</b>

### C.3. ASET LAINNYA

#### C.3.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp892.596.927,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018</b>	<b>892.596.927,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-415.675.927,00
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	-476.921.000,00
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>0,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	<b>0,00</b>

Mutasi transaksi pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa adanya asset yang telah dihentikan dari penggunaannya namun belum diproses penetapan status penggunaannya sehingga asset tersebut dilakukan pengaktifan kembali, dimana

saat ini sedang dilakukan proses pengumpulan data untuk penetapan status penggunaan dari aset tersebut.

### C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-890.956.713,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

### C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp54.909.500,00 dan Rp47.040.250,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

#### Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	25.626.000,00	0,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	29.283.500,00	47.040.250,00
<b>Jumlah</b>	<b>54.909.500,00</b>	<b>47.040.250,00</b>

## C.5. EKUITAS

### C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp30.254.335.050,00 dan Rp30.743.842.119,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp381.264.353,00 dan Rp377.364.386,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya  
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	6.641.580,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	338.352.773,00	349.308.386,00	-3,14
Pendapatan Jasa Lainnya	36.270.000,00	28.056.000,00	29,28
<b>Jumlah</b>	<b>381.264.353,00</b>	<b>377.364.386,00</b>	<b>1,03</b>

Adanya penambahan terhadap realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya dikarenakan

1. Pada tahun 2019 adanya pekerjaan pengadaan lewat proses pembelian yang mengalami jatuh tempo, sehingga bagi penyedia barang/jasa diberikan sanksi untuk membayar denda sebesar Rp.6.641.580,00
2. Adanya peningkatan terhadap Pendapatan Lainnya yang diperoleh dari pelaksanaan Tindak Karantina Pertanian diluar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran yang telah ditetapkan.

### D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.465.369.386,00 dan Rp3.022.203.314,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai  
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.600.266.900,00	1.318.298.640,00	21,39

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Pembulatan Gaji PNS	29.933,00	27.578,00	8,54
Beban Tunj. Anak PNS	33.166.633,00	28.433.096,00	16,65
Beban Tunj. Beras PNS	94.290.840,00	82.413.960,00	14,41
Beban Tunj. Fungsional PNS	142.680.000,00	134.820.000,00	5,83
Beban Tunj. PPh PNS	771.350,00	0,00	0,00
Beban Tunj. Struktural PNS	30.870.000,00	34.300.000,00	-10,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	109.564.730,00	92.001.040,00	19,09
Beban Tunjangan Umum PNS	46.440.000,00	30.720.000,00	51,17
Beban Uang Lembur	1.095.273.000,00	1.052.622.000,00	4,05
Beban Uang Makan PNS	312.016.000,00	248.567.000,00	25,53
<b>Jumlah</b>	<b>3.465.369.386,00</b>	<b>3.022.203.314,00</b>	<b>14,66</b>

Jumlah Beban Pegawai di Tahun 2019 lebih besar dibandingkan beban pegawai Tahun 2018 dikarenakan :

1. Adanya penambahan pegawai baru (CPNS) sebanyak 7 orang dengan jumlah tanggungan sebanyak 14 jiwa
2. Adanya kenaikan pangkat pegawai dalam jabatan fungsional dan reguler sebanyak 8 orang pegawai

### D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp556.770.891,00 dan Rp137.749.815,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan  
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	556.770.891,00	137.749.815,00	304,19
<b>Jumlah</b>	<b>556.770.891,00</b>	<b>137.749.815,00</b>	<b>304,19</b>

Beban Persediaan di tahun 2019 mengalami penambahan dikarenakan adanya peningkatan penggunaan barang persediaan yang digunakan untuk operasional kantor induk maupun wilayah kerja.

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.814.375.500,00 dan Rp2.440.358.500,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa  
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0,00	41.250.000,00	-100,00
Beban Bahan	385.324.000,00	220.970.000,00	74,38
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0,00	100.000.000,00	-100,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	156.720.000,00	143.520.000,00	9,20
Beban Honor Output Kegiatan	104.640.000,00	117.840.000,00	-11,20
Beban Jasa Lainnya	96.015.000,00	72.690.000,00	32,09
Beban Jasa Profesi	16.800.000,00	23.200.000,00	-27,59
Beban Keperluan Perkantoran	1.385.373.900,00	1.111.242.500,00	24,67
Beban Langganan Air	61.313.750,00	44.193.000,00	38,74
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	31.996.250,00	24.762.000,00	29,22
Beban Langganan Listrik	311.220.450,00	280.057.000,00	11,13
Beban Langganan Telepon	8.320.050,00	20.411.900,00	-59,24
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	156.815.850,00	127.760.100,00	22,74
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	17.996.250,00	20.200.000,00	-10,91
Beban Sewa	81.840.000,00	92.262.000,00	-11,30
<b>Jumlah</b>	<b>2.814.375.500,00</b>	<b>2.440.358.500,00</b>	<b>15,33</b>

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp719.297.050,00 dan Rp692.063.350,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan  
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	252.390.000,00	270.316.000,00	-6,63
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	466.907.050,00	421.747.350,00	10,71
<b>Jumlah</b>	<b>719.297.050,00</b>	<b>692.063.350,00</b>	<b>3,94</b>

**D.6. Beban Perjalanan Dinas**

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.301.743.259,00 dan Rp1.118.471.050,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas  
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	600.203.450,00	432.384.250,00	38,81
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	56.750.000,00	51.000.000,00	11,27
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	46.027.400,00	10.553.050,00	336,15
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	504.621.109,00	553.258.150,00	-8,79
Beban Perjalanan Tetap	94.141.300,00	71.275.600,00	32,08
<b>Jumlah</b>	<b>1.301.743.259,00</b>	<b>1.118.471.050,00</b>	<b>16,39</b>

Adapun penambahan terhadap beban perjalanan dinas tahun 2019 disebabkan sebagai berikut :

1. Adanya banyak Undangan Kementerian Pertanian, Badan Karantina Pertanian dan Instansi Terkait.
2. Adanya peningkatan harga satuan tiket pesawat yang mempengaruhi realisasi biaya perjalanan dinas.

**D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar

Rp1.394.934.566,00 dan Rp559.184.541,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	385.319.722,00	188.760.789,00	104,13
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	7.947.500,00	3.740.000,00	112,50
Beban Penyusutan Jaringan	3.606.288,00	1.770.973,00	103,63
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.159.979,00	2.146.819,00	-45,97
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	996.901.077,00	362.765.960,00	174,81
<b>Jumlah</b>	<b>1.394.934.566,00</b>	<b>559.184.541,00</b>	<b>149,46</b>

#### D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-18.547,00 dan Rp21.678,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang PNB	-18.547,00	21.678,00	-185,56
<b>Jumlah</b>	<b>-18.547,00</b>	<b>21.678,00</b>	<b>-185,56</b>

#### D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi

entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional  
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-35.725.700,00	-6.814.462,00	424,26
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	-4.997.647,00	-2.187.341,00	128,48
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	76.210.525,00	23.059.033,00	230,50
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	66.400.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	3.466.169,00	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>101.887.178,00</b>	<b>17.523.399,00</b>	<b>481,44</b>

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp30.743.842.119,00 dan Rp30.149.797.522,00.

### E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp-9.769.320.574,00 dan Rp-7.575.164.463,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

#### E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

### E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp9.279.813.505,00 dan Rp8.169.209.060,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	9.714.367.945,00
Diterima dari Entitas Lain	-451.373.690,00
Transfer Masuk	16.819.250,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.279.813.505,00</b>

#### E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2019 saldo DDEL adalah sebesar Rp-451.373.690,00 sedangkan DKEL sebesar Rp9.714.367.945,00.

#### E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp16.819.250,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2019.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Barang Konsumsi	018120199412110000KP	16.819.250,00
2.	Peralatan dan Mesin	018120500237483000KD	225.000.000,00
3.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	018120500237483000KD	-225.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>16.819.250,00</b>

#### E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp30.254.335.050,00 dan Rp30.743.842.119,00.



## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

#### 1. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak merupakan penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate, senilai Rp.626.224,00 yang disetorkan ke Kas Negara per tanggal 02 Januari 2020 sebanyak 3 (tiga) billing bukti penyetoran, yang disetorkan pada Bank Rakyat Indonesia dan tanggal 07 Januari 2020 sebanyak 1 (satu) billing bukti penyetoran, yang disetorkan pada Bank Mandiri.

#### 2. Akrua

Akrual pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate periode 31 Desember 2019 merupakan Belanja Yang Masih Harus Dibayar, baik belanja pegawai maupun belanja barang.

##### - Belanja Pegawai

Belanja Pegawai yang masih harus dibayar adalah Belanja Uang Makan PNS bulan Desember 2019, dikarenakan anggaran pada akun belanja pegawai uang makan PNS tidak mencukupi untuk mengakomodir pembayaran di bulan Desember 2019. Adapun Uang Makan Pegawai PNS bulan Desember 2019 sebesar Rp.25.626.000,00 yang telah di bayar pada bulan Januari 2020.

##### - Belanja Barang

Belanja Barang yang masih harus dibayar adalah Beban Langganan Listrik sebesar Rp.23.950.000,00, Beban Langganan Telepon sebesar Rp.381.500,00 dan Beban Langganan Air sebesar Rp.4.952.000,00 yang telah di bayarkan di bulan Januari 2020.

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

#### 1. Revisi

Sampai dengan 31 Desember 2019 Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate telah melakukan Revisi Anggaran berupa Revisi Anggaran DIPA sebanyak 1 kali dan Revisi POK sebanyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut :

- Revisi 1 Tanggal 27 Juni 2019 (Revisi DIPA)
- Revisi 2 Tanggal 28 Agustus 2019
- Revisi 3 Tanggal 30 September 2019
- Revisi 4 Tanggal 13 Nopember 2019
- Revisi 5 Tanggal 28 Nopember 2019

#### 2. Struktur Pengelola Keuangan

Struktur Pengelolaan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate Periode 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

- Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Yusup Patiroy, MM
- Pejabat Pembuat Komitmen: Simon Soli, S.Pt
- PP-SPM : drh. Sertyawan Pramularsi
- Bendahara Pengeluaran : Mursyalim
- Bendahara Penerimaan : Rafidah
- Staf Pengelola Anggaran : Samsuddin, S.Tp, Ronaldo Kakiay, Haddad Hi Luth
- Pejabat Pengadaan Barjas : Julia Putiray, SE, MH
- Pejabat PPHPBJ : Muh. Rusli Samma S